

Prinsip Syariah Sebagai Determinan Implementasi Proyek Infrastruktur: Bukti Empiris Dari BBWS Sumatera VIII Palembang

Nuryani, Ali Yusuf Syakir, Andrew Hari Yoga

^{1,2,3} STES Bhakti Nugraha

Email: andrewhariyoga@stesbn.ac.id

Sejarah Artikel:

Disubmit: Maret 19th, 2026 Diproses: Mei 12th, 2026 Terbit: Juli 31th, 2026

Abstrak

Penelitian ini menguji pengaruh persepsi penerapan prinsip syariah terhadap persepsi implementasi proyek infrastruktur di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII Palembang. Prinsip syariah dioperasionalkan melalui dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang mencakup keadilan, transparansi, amanah, instrumen keuangan syariah, pemerataan manfaat, serta keberlanjutan. Implementasi proyek diukur melalui akses masyarakat, pengelolaan lingkungan, transparansi keuangan, kualitas layanan, partisipasi, pemberdayaan ekonomi lokal, dan kesejahteraan sosial. Penelitian menggunakan survei kuantitatif eksplanatori terhadap 62 responden yang dipilih secara purposif dari populasi 160 pegawai. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert empat tingkat serta didukung wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil pengujian menunjukkan instrumen prinsip syariah reliabel dengan Cronbach's Alpha 0,867 dan instrumen implementasi proyek 0,737. Residual model berdistribusi normal berdasarkan Kolmogorov-Smirnov dengan $p=0,200$. Regresi menghasilkan persamaan $Y=4,600+0,341X$. Prinsip syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi proyek dengan koefisien $B=0,341$, $Beta=0,809$, $t=10,655$, dan $p<0,001$. Nilai R^2 sebesar 0,654 menunjukkan bahwa model menjelaskan 65,4% variasi skor implementasi proyek dalam sampel. Temuan mendukung penguatan keadilan, transparansi, amanah, partisipasi, dan keberlanjutan sebagai orientasi tata kelola proyek. Namun, karena kedua variabel diukur melalui persepsi pada satu waktu, hasil tidak langsung membuktikan kinerja teknis proyek atau penggunaan akad mudharabah secara faktual. Penelitian selanjutnya perlu menggabungkan data persepsi dengan kontrak pembiayaan, audit, realisasi anggaran, mutu, dan ketepatan waktu proyek.

Keywords: Prinsip Syariah; Tata Kelola Proyek; Infrastruktur; Transparansi; Keadilan; Regresi Linear.

Copyright © 2026 Nuryani

Correspondence Address:

Email Address: andrewhariyoga@stesbn.ac.id

Citation: Nuryani (2026). Prinsip Syariah Sebagai Determinan Implementasi Proyek Infrastruktur: Bukti Empiris Dari BBWS Sumatera VIII Palembang. *International Journal of Halal Economic*. Volume 3, No. 2, bulan Juli 2026

A. Pendahuluan

Infrastruktur sumber daya air berperan dalam pengendalian banjir, irigasi, konservasi, pengelolaan sungai, dan perlindungan masyarakat dari risiko lingkungan. Keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan oleh penyelesaian fisik, tetapi juga oleh tata kelola anggaran, keadilan distribusi manfaat, partisipasi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Kompleksitas tersebut menempatkan nilai etik sebagai bagian penting dari manajemen proyek publik.

Prinsip syariah menawarkan kerangka nilai yang menghubungkan pembiayaan dan tata kelola. Keadilan menuntut distribusi manfaat serta beban yang wajar; amanah menuntut pertanggungjawaban; transparansi mengharuskan keterbukaan informasi; larangan gharar mendorong kejelasan kontrak dan risiko; musyawarah memperkuat partisipasi; sedangkan masalah mengarahkan proyek pada kemanfaatan sosial dan perlindungan lingkungan. Nilai tersebut relevan meskipun proyek tidak selalu menggunakan instrumen pembiayaan syariah.

Kajian keuangan syariah juga menawarkan sukuk, ijarah, musyarakah, mudharabah, dan skema kemitraan sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur. Model berbagi risiko berpotensi menyelaraskan kepentingan pemilik dana dan pengelola, sedangkan pembiayaan berbasis aset dapat memperjelas hubungan antara dana dan kegiatan produktif (El-Gamal, 2006; Obaidullah, 2008). Akan tetapi, penerapan instrumen tertentu harus dibuktikan melalui akad serta dokumen pembiayaan, bukan hanya persepsi responden.

BBWS Sumatera VIII Palembang melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya air, seperti pengendalian banjir, normalisasi sungai, rehabilitasi dan konservasi, pembangunan serta pemeliharaan irigasi, dan pengendalian erosi serta sedimentasi. Dalam lingkungan proyek pemerintah, prinsip syariah dapat berfungsi sebagai bahasa tata kelola yang memperkuat aturan formal melalui orientasi moral: dana publik diperlakukan sebagai amanah dan manfaat pembangunan diarahkan bagi masyarakat.

Penelitian terdahulu membahas potensi pembiayaan infrastruktur syariah dan kontribusi sukuk terhadap pembangunan (Fakhri, 2019; Soelistyo, 2021; Salsabila, 2024). Kajian pembangunan berkelanjutan juga menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai nilai penting (Kholifa, 2020; L. M. dkk., 2024). Namun, bukti kuantitatif pada unit pengelola proyek sumber daya air masih terbatas. Penelitian ini menguji apakah skor persepsi prinsip syariah menjadi determinan skor implementasi proyek pada BBWS Sumatera VIII Palembang.

Tujuan penelitian adalah menguji arah dan kekuatan pengaruh prinsip syariah terhadap implementasi proyek, mengukur kemampuan penjelasan model, dan merumuskan implikasi tata kelola. Istilah determinan digunakan

dalam batas model regresi satu prediktor, bukan sebagai klaim bahwa prinsip syariah merupakan satu-satunya penyebab keberhasilan proyek.

Pembangunan dalam perspektif maqasid al-shariah diarahkan pada kemaslahatan dan perlindungan kehidupan, harta, serta keberlanjutan generasi. Infrastruktur menjadi sarana untuk mencapai tujuan tersebut apabila direncanakan berdasarkan kebutuhan, dilaksanakan secara amanah, dan manfaatnya dapat diakses secara adil. Chapra (2008) menempatkan keadilan, kesejahteraan, dan pertanggungjawaban moral sebagai bagian integral pembangunan.

Implementasi proyek dalam penelitian ini merupakan konstruk multidimensi yang mencakup keterjangkauan layanan, keberlanjutan lingkungan, transparansi keuangan, kualitas layanan, partisipasi masyarakat, lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Pengukuran tersebut lebih luas daripada kinerja teknis proyek. Karena itu, skor variabel Y merepresentasikan persepsi responden terhadap kualitas implementasi dan manfaat proyek, bukan audit fisik atau finansial.

Keadilan, amanah, serta transparansi diperkirakan memperbaiki proses pengambilan keputusan, mengurangi asimetri informasi, memperjelas tanggung jawab, dan mengarahkan proyek pada kebutuhan masyarakat. Prinsip lingkungan dan masalah memperluas orientasi proyek dari output fisik menuju keberlanjutan. Berdasarkan argumentasi tersebut, hipotesis penelitian adalah: prinsip syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi proyek infrastruktur.

B. Metode

Penelitian menggunakan desain survei kuantitatif eksplanatori dengan pendekatan potong lintang. Lokasi penelitian adalah BBWS Sumatera VIII Palembang. Populasi berjumlah 160 orang, terdiri atas 120 pegawai negeri sipil dan 40 tenaga non-PNS. Ukuran sampel dihitung menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10% dan menghasilkan 61,54, dibulatkan menjadi 62 responden.

Pemilihan responden menggunakan purposive sampling berdasarkan keterlibatan serta pengetahuan mengenai pengelolaan proyek. Karakteristik gender seimbang: 31 laki-laki dan 31 perempuan. Data utama dikumpulkan melalui kuesioner tertutup dengan skala empat tingkat, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Wawancara terpimpin, observasi, dan dokumentasi digunakan sebagai sumber pendukung konteks.

Variabel X adalah persepsi prinsip syariah dengan 14 butir yang meliputi dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Variabel Y adalah persepsi implementasi proyek dengan butir mengenai akses, keberlanjutan lingkungan, transparansi, layanan, partisipasi, pemberdayaan, dan kesejahteraan. Analisis mencakup validitas item, reliabilitas Cronbach's Alpha, normalitas residual, regresi linear sederhana, koefisien determinasi, dan uji t.

Model statistik dirumuskan sebagai $Y=a+bX$. Hipotesis diterima apabila koefisien X berarah positif dengan nilai signifikansi di bawah 0,05. Karena data berasal dari kuesioner pada responden yang sama dan dikumpulkan pada waktu yang sama, hasil diinterpretasikan sebagai pengaruh statistik dalam model, dengan kehati-hatian terhadap bias metode bersama serta keterbatasan inferensi kausal.

C. Hasil & Pembahasan

1. Kualitas Instrumen

Seluruh item variabel prinsip syariah mempunyai korelasi item-total 0,506–0,732, lebih besar daripada r-tabel 0,250. Item variabel implementasi proyek memiliki korelasi 0,523–0,691 dan juga melampaui r-tabel. Hasil ini menunjukkan item memenuhi kriteria validitas empiris yang digunakan dalam penelitian.

Variabel	Jumlah item	Rentang r-hitung	Cronbach's Alpha	Interpretasi
Prinsip syariah (X)	14	0,506–0,732	0,867	Konsistensi internal baik
Implementasi proyek (Y)	7 dalam output reliabilitas	0,523–0,691 pada tabel validitas	0,737	Konsistensi internal memadai

Cronbach's Alpha sebesar 0,867 untuk X dan 0,737 untuk Y menunjukkan konsistensi internal yang memadai. Terdapat ketidaksesuaian kecil dalam naskah sumber karena tabel validitas menampilkan enam item Y, sedangkan output reliabilitas menyebut tujuh item. Artikel mempertahankan hasil output, tetapi perbedaan tersebut perlu diperiksa kembali pada data mentah sebelum naskah dikirim ke jurnal.

2. Uji Normalitas

Uji Kolmogorov–Smirnov terhadap residual menghasilkan statistik 0,087 dengan $p=0,200$. Karena nilai p lebih besar daripada 0,05, tidak terdapat bukti untuk menolak asumsi normalitas residual. Hasil ini mendukung penggunaan uji parametrik dalam model regresi sederhana.

3. Pengaruh Prinsip Syariah terhadap Implementasi Proyek

Ukuran statistik	Nilai	Makna
R	0,809	Hubungan positif yang kuat dalam sampel
R ²	0,654	65,4% variasi skor Y dijelaskan model
Adjusted R ²	0,648	Kemampuan penjelasan setelah penyesuaian
Konstanta	4,600	Nilai prediksi Y ketika $X=0$ secara matematis
Koefisien B	0,341	Kenaikan satu unit X diikuti 0,341 unit Y
Beta	0,809	Kekuatan pengaruh terstandar

t; p	10,655; <0,001	Koefisien X positif dan signifikan
Std. error estimasi	1,460	Rata-rata simpangan prediksi model

Persamaan regresi adalah $Y=4,600+0,341X$. Koefisien positif menunjukkan bahwa peningkatan skor prinsip syariah berasosiasi dengan peningkatan skor implementasi proyek. Nilai t sebesar 10,655 dengan $p<0,001$ mendukung penolakan hipotesis nol. Dengan demikian, prinsip syariah menjadi prediktor positif dan signifikan dalam model penelitian.

R^2 sebesar 0,654 menunjukkan model menjelaskan 65,4% variasi skor implementasi proyek dalam sampel, sedangkan 34,6% tidak dijelaskan oleh model. Bagian yang tidak dijelaskan dapat berkaitan dengan kapasitas teknis, kualitas perencanaan, pengadaan, kepemimpinan, anggaran, kompetensi kontraktor, kondisi lapangan, koordinasi, teknologi, regulasi, atau faktor lainnya. R^2 tidak berarti prinsip syariah secara faktual menyebabkan 65,4% keberhasilan fisik proyek.

4. Prinsip Syariah sebagai Kerangka Tata Kelola

Kekuatan hubungan dapat dijelaskan oleh kedekatan nilai syariah dengan unsur tata kelola proyek. Amanah dan transparansi berhubungan langsung dengan pelaporan dan penggunaan anggaran. Keadilan serta masalah berhubungan dengan akses dan distribusi manfaat. Musyawarah berhubungan dengan partisipasi masyarakat, sedangkan tanggung jawab lingkungan berhubungan dengan keberlanjutan sumber daya air. Oleh karena itu, responden yang menilai nilai tersebut diterapkan dengan baik cenderung sekaligus menilai implementasi proyek lebih baik.

Kedekatan konseptual tersebut juga menjadi batas metodologis. Sebagian indikator X dan Y sama-sama memuat transparansi, keberlanjutan, pemerataan, dan manfaat sosial. Tumpang tindih isi konstruk serta penggunaan sumber responden yang sama dapat memperbesar korelasi. Penelitian lanjutan perlu membedakan secara lebih tegas antara nilai atau proses tata kelola sebagai prediktor dan keluaran proyek sebagai hasil.

Temuan tidak cukup untuk menyatakan bahwa proyek menggunakan mudharabah. Mudharabah mempunyai unsur pemilik modal, pengelola, modal, nisbah keuntungan, risiko kerugian, dan akad yang terdokumentasi. Tanpa kontrak pembiayaan, data anggaran, dan bukti pembagian hasil, mudharabah sebaiknya diposisikan sebagai kemungkinan teoritis, bukan fakta empiris. Kontribusi yang paling didukung data adalah prinsip syariah sebagai orientasi etis tata kelola.

5. Implikasi Manajerial

Pertama, nilai amanah, keadilan, transparansi, dan masalah dapat diterjemahkan menjadi indikator yang dapat diaudit. Contohnya meliputi

keterbukaan progres dan anggaran, ketepatan mutu serta waktu, mekanisme pengaduan, pelibatan masyarakat, distribusi manfaat, keselamatan, dan pengendalian dampak lingkungan. Penerjemahan tersebut menjaga agar prinsip syariah tidak berhenti sebagai slogan.

Kedua, sistem informasi proyek dapat digunakan untuk mencatat progres, perubahan kontrak, penggunaan anggaran, risiko, dan tindak lanjut pengawasan. Teknologi memperkuat transparansi apabila akses, validasi, dan pertanggungjawaban datanya jelas. Ketiga, apabila pembiayaan syariah benar-benar dipertimbangkan, kajian perlu melibatkan ahli hukum, keuangan publik, pengadaan, dan syariah serta menyesuaikannya dengan regulasi pemerintah.

D. Kesimpulan

Prinsip syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi implementasi proyek infrastruktur di BBWS Sumatera VIII Palembang. Model menghasilkan $R=0,809$, $R^2=0,654$, koefisien $B=0,341$, $Beta=0,809$, $t=10,655$, dan $p<0,001$. Instrumen menunjukkan konsistensi internal yang baik dan residual memenuhi asumsi normalitas berdasarkan kriteria penelitian.

Temuan mendukung penggunaan keadilan, amanah, transparansi, musyawarah, dan masalah sebagai orientasi tata kelola proyek. Nilai tersebut relevan bagi pengelolaan anggaran, akuntabilitas, partisipasi, pemerataan manfaat, dan keberlanjutan. Namun, hasil berbasis persepsi potong lintang tidak secara langsung mengukur kinerja teknis atau membuktikan penggunaan akad pembiayaan tertentu.

BBWS disarankan mengoperasionalkan prinsip syariah melalui indikator tata kelola yang terukur, pengawasan, keterbukaan data, dan pelibatan pemangku kepentingan. Penelitian berikutnya perlu memakai data multi-sumber, mengukur ketepatan waktu, mutu, biaya, audit, serta manfaat, dan menggunakan desain longitudinal. Pemeriksaan ulang jumlah item variabel Y serta pemisahan indikator X dan Y juga diperlukan untuk meningkatkan validitas konstruk.

REFERENCES

- AAOIFI. (2015). Shari'ah standards. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Asian Development Bank. (2016). Meeting Asia's infrastructure needs.
- Chapra, M. U. (2008). The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shari'ah. International Institute of Islamic Economics.
- El-Gamal, M. A. (2006). Islamic finance: Law, economics, and practice. Cambridge University Press.
- Fakhri, M. (2019). Analisis potensi dan risiko pembiayaan infrastruktur jalan tol berbasis syariah di Indonesia, 11.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic econometrics. McGraw-Hill.
- Kholifa, A. (2020). Penerapan keadilan dalam pembangunan ekonomi, 335–344.
- L. M., dkk. (2024). Implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan, 217.
- Obaidullah, M. (2008). Islamic financial services. King Abdulaziz University.
- Salsabila, A. S. (2024). Potensi ekonomi syariah dalam pembangunan infrastruktur sektor transportasi di Indonesia, 93.
- Soelistyo, A. P. (2021). Analisis pengaruh sukuk terhadap pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia tahun 2014–2018, 100.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- World Bank. (2017). Infrastructure for development: A policy framework.